XLVI HARIAN UMUM

Pikiran Rakyat

DARI RAKYAT - OLEH RAKYAT - UNTUK RAKYAT

BANDUNG, RABU (MANIS) 9 NOVEMBER 2011

13 ZULHIJAH 1432 H - RAYAGUNG 1944

Pikiran Rakyat
RABU (MANIS) 9 NOVEMBER 2011
13 ZULHIJAH 1432 H
RAYAGUNG 1944

Solusi Hijau Buat Negeriku

Oleh RIKI MARTUSA

HIJAU negeriku akan menjadi luntur dimakan waktu. Pernyataan ini saya lontarkan berkaitan dengan sistem penyeleksian investor yang dapat beroperasi di negara Indonesia ini.

BARU-BARU ini, masyarakat Jawa Barat menjadi resah dengan operasional PT Chevron. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung yang meninjau ke lapangan menyatakan bahwa operasional PT Chevron harus dihentikan karena meresahkan masyarakat.

Kasus-kasus pencemaran lainnya juga timbul di berbagai pelosok negeri kita. Mulai dari PT Newmont yang melakukan pencemaran di Papua. Lalu pencemaran yang dilakukan PT Lapindo Brantas yang tak kunjung selesai hingga sekarang. Masalah pencemaran ini menurut saya sudah menjadi bencana nasional. Hal itu sepatutnya menjadi perhatian pemerintah serta seluruh masyarakat Indonesia.

Sistem pengawasan

Salah satu solusi untuk mengatasi kasus-kasus pencemaran yang diakibatkan oleh beroperasinya korporasi-korporasi raksasa di negara kita adalah sistem pengawasan yang dilakukan oleh negara Indonesia. Sistem pengawasan lingkungan dapat dilakukan dengan mengukur informasi lingkungan di seluruh pelosok negara kita dengan sistem pengukuran yang terpadu.

Sistem pengukuran yang saya usulkan untuk mencegah pencemaran lingkungan di negara ini adalah Sistem Informasi Akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi bertujuan untuk menyajikan informasi sesuai dengan tujuan tertentu. Informasi yang disajikan harus diproses dahulu agar informasi tersebut memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang akan mengambil keputusan. Apabila kita ingin mendapatkan informasi tentang lingkungan, isi informasi yang diproses adalah unsur-unsur tentang lingkungan. Unsur-unsur lingkungan tersebut harus dikuantitatifkan untuk diukur dan disajikan dalam bentuk angka. Jadi, informasi tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan lingkungan.

Pemerintah dapat mewajibkan sejumlah perusahaan menyajikan pertanggungjawabannya mengenai pengelolaan lingkungan akibat limbah operasional perusahaan tersebut. Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi melalui badan pengawas pasar modal untuk mewajibkan setiap perusahaan yang terdaftar agar menyajikan pengungkapan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan lingkungannya (Corporate Social Responsibility/CSR). Penyajian CSR tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ke tempat lokasi pengolahan limbah perusahaan oleh aparat pemerintah yang berwenang.

Praktik pemeriksaan ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Hanya, hasil pelaksanaannya jauh dari harapan. Terjadi beberapa penyimpangan dalam pemeriksaan tersebut karena oknum aparat pemerintah telah menerima suap dari perusahaan yang diperiksanya. Pelaksanaan pemeriksaan ini harus menjadi fokus pemerintah untuk membenahinya. Hal tersebut berkaitan dengan masa depan seluruh generasi penerus di bumi Indonesia ini.

Pelaksanaan CSR yang berpusat di perusahaan-perusahaan tidaklah cukup untuk mencegah terjadinya *global warming* di seluruh penjuru dunia. Sistem akuntansi pertanggungjawaban negara perlu disusun dan diterapkan di Indonesia. Sistem akuntansi tersebut direkayasa (*engineered*) untuk tujuan pengelolaan ekonomi dan lingkungan Indonesia.

"Green accounting"

Beberapa negara di dunia ini sudah mencoba menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban lingkungan ini di masing-masing negaranya. Sistem akuntansi tersebut dikenal dengan nama *green accounting*. *Green accounting* adalah sistem akuntansi pertanggungjawaban negara mengenai pengelolaan ekonomi dan bisnis yang dihubungkan dengan kelestarian lingkungan di negara tersebut. Pemerintah perlu melakukan sistem pengukuran tersebut untuk menunjukkan potensi ekonomi yang hilang akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk menerapkan *green accounting* di Indonesia.

Tahap pertama, pemerintah perlu bekerja sama dengan beberapa pakar lingkungan, akuntan, serta pakar pengukuran ekonomi dan lingkungan untuk mendeteksi seberapa parah terjadinya kerusakan lingkungan. Melalui kerja sama yang terpadu dari beberapa pakar, akan didapat hasil-hasil pengukuran mengenai kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan yang terjadi. Hasil pengukuran tersebut perlu diproses untuk memastikan keakuratan hasilnya. Lalu hasil mengenai kerugian ekonomi tersebut harus dipublikasikan oleh pemerintah di media massa agar diketahui seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahap ini, pemerintah harus menyadarkan masyarakat tentang perlunya melestarikan lingkungan dan akibat yang ditimbulkan jika mereka berpartisipasi dalam merusak lingkungan.

Tahap kedua, setelah masyarakat cukup sadar mengenai perlunya menjaga kelestarian lingkungan, pemerintah perlu mulai membentuk tim pakar untuk mempelajari lebih lanjut mengenai tingkat kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Setiap aspek yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan perlu ditinjau mengenai bagaimana melakukan langkah-langkah perbaikan dan pencegahan kerusakan lingkungan tersebut. Pakar lingkungan hidup mencoba memikirkan berbagai cara untuk memperbaiki lingkungan. Lalu, akuntan mencoba membantu menyajikan hasil pengukuran perbaikan tersebut menjadi informasi dalam bentuk laporan akuntansi lingkungan.

Tahap ketiga, pemerintah bersama tim pakar harus mencoba membuat sistem pengukuran untuk mendeteksi tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi. Hasil sistem pengukuran tersebut berupa informasi yang akan disusun dalam bentuk laporan akuntansi lingkungan. Seluruh sistem pengukuran yang bentuk dan cara penyajian informasi mengenai keadaan lingkungan di negara Indonesia itulah yang disebut sebagai *green accounting*. Jadi, *green accounting* merupakan sistem pengukuran dan pelaporan informasi mengenai lingkungan di suatu negara. Hasil informasi tersebut akan menjadi tolok ukur atau acuan bagi pemerintah untuk membenahi masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia. Melalui *green accounting* juga, pemerintah dapat merencanakan berbagai pencegahan kerusakan lingkungan yang dilekati dengan regulasi yang mengaturnya.

Jadi, menurut pendapat saya, negara Indonesia sudah waktunya mulai berpartisipasi penuh pada kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan yang ada di mancanegara. ***

***Penulis**, Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.*

OLE-OLE

timnas

TIM Nasional Indonesia U-23 memimpin Grup A.
- Ditunggu prestasi berikutnya, Garudaku!

bubar

KALANGAN MPR dan DPR menolak wacana pembubaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Ganti saja hakim-hakim yang bermasalahnya, gampang kan?

lagi

JALAN Soekarno-Hatta Kota Bandung rusak lagi.
- Projek lagi deh.

Si Kabajan

da 13 September 20